

PERAN UMKM DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN CIGUGUR TENGAH, KECAMATAN CIMAH TENGAH, KOTA CIMAH

Journal History: Received February 1st 2026 | Accepted July 11th 2026 | Available Online July 15th 2026

Ajeng Ayu Ariyandita

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia

Elly Susilowati

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia
e-mail: elly.susilowati@poltekesos.ac.id

Wendy Pradytia

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia
e-mail: whendie.pradytia@gmail.com

Rosilawati

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia
e-mail: rosilawati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the socio-economic empowerment of poor communities in Cigugur Tengah Subdistrict, Cimahi Tengah District, Cimahi City. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analysis was guided by Ife and Tesoriero's community development framework, which conceptualizes empowerment roles into facilitative, educative, representational, and technical dimensions. The findings reveal that MSMEs have performed all four roles; however, their implementation remains uneven and insufficiently integrated. Facilitative and educative roles are the most dominant, reflected in the provision of employment access, direct socio-economic support, and practice-based skill development. In contrast, representational and technical roles are relatively weak, particularly in linking poor workers to external resources, strengthening networks, enhancing digital literacy, and developing capacity-building systems. This imbalance results in an empowerment pattern that is largely survival-oriented, effectively supporting short-term economic stability but falling short of promoting long-term socio-economic mobility. The study demonstrates that the effectiveness of MSME-based empowerment is not determined by the mere presence of empowerment roles, but by the extent to which these roles are interconnected within a coherent empowerment pathway. This research contributes to the empowerment literature by offering a role-configuration perspective and provides practical insights for strengthening MSMEs as agents of more transformative and sustainable community empowerment.

Keywords: MSMEs; socio-economic empowerment; poor communities; MSME roles; community development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka peran pengembangan masyarakat dari Ife dan Tesoriero yang mencakup peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM telah menjalankan keempat peran tersebut, namun dengan tingkat intensitas dan kualitas yang tidak seimbang. Peran fasilitatif dan edukatif tampak paling dominan melalui penyediaan akses kerja, dukungan sosial-ekonomi langsung, serta pelatihan berbasis praktik. Sebaliknya, peran representasional dan teknis masih terbatas, terutama dalam menjembatani akses terhadap sumber daya eksternal, penguatan jejaring, literasi digital, dan pembangunan sistem kapasitas pekerja. Ketimpangan antarperan ini menghasilkan pola pemberdayaan yang cenderung bersifat bertahan hidup (survival-oriented), yaitu efektif menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek tetapi belum mampu mendorong mobilitas sosial ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pemberdayaan berbasis UMKM tidak ditentukan oleh keberadaan peran semata, melainkan oleh keterhubungan peran-peran tersebut dalam membentuk jalur pemberdayaan yang utuh. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami mekanisme pemberdayaan berbasis UMKM serta implikasi praktis bagi penguatan peran UMKM agar lebih transformatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM; pemberdayaan sosial ekonomi; masyarakat miskin; peran UMKM; pemberdayaan komunitas

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Keduanya berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar, ketahanan keluarga, dan stabilitas sosial di tingkat komunitas (Suharto, 2005; Nursini, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2025), persentase penduduk miskin pada September 2024 mencapai 8,57% atau 24,06 juta jiwa. Pada Agustus 2024, jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,47 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,91% (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada periode yang sama, TPT Jawa Barat mencapai 6,75% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh penghidupan yang stabil. Risiko kerentanan sosial-ekonomi terutama dialami kelompok miskin yang memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan, pelatihan, dan jejaring ekonomi. Pengangguran tidak hanya menghilangkan pendapatan, tetapi juga menurunkan kesejahteraan sosial dan psikologis individu serta keluarga. Persoalan ini semakin kompleks ketika jumlah pencari kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Kompetisi meningkat dan kelompok rentan semakin sulit memasuki pasar kerja. Dalam kerangka Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, kondisi tersebut menuntut intervensi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro. Intervensi juga harus memperkuat kapasitas, akses, dan kemandirian masyarakat miskin melalui mekanisme pemberdayaan di tingkat lokal (United Nations, 2015).

Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap dipandang sebagai strategi penting untuk merespons kemiskinan dan pengangguran karena UMKM berkontribusi terhadap penciptaan kerja dan penguatan ekonomi lokal (Prasetyo, 2008; Nursini, 2020; Qadisyah et al., 2023). Secara nasional, jumlah UMKM dilaporkan lebih dari 64 juta unit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Pada 2023, Jawa Barat memiliki 7.055.660 unit UMKM (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024). Dokumen pemerintah daerah yang dianalisis dalam penelitian mencatat lebih dari 12.000 pelaku UMKM di Kota Cimahi (Pemerintah Kota Cimahi, 2024). Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di kota ini tercatat 27.001 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2026). Namun, indikator makro tersebut belum menjelaskan bagaimana UMKM membantu kelompok miskin keluar dari kerentanan. Persoalan utamanya bukan hanya ketersediaan pekerjaan. Hal yang lebih penting ialah apakah kesempatan kerja tersebut disertai proses pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas, memperkuat perlindungan dasar, dan membuka mobilitas sosial-ekonomi. Kesenjangan tersebut terlihat di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Data administratif kelurahan mencatat jumlah penduduk sekitar 47.560 jiwa. Sekitar 32% penduduk bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan sekitar 22% belum bekerja. Data yang sama mencatat sekitar 122 pelaku UMKM dengan ragam usaha, seperti budidaya ikan, pakaian atau konveksi, dan produksi makanan (Kelurahan Cigugur Tengah, 2024). Ekosistem tersebut menyediakan peluang nyata untuk mengurangi pengangguran. Namun, data lapangan juga menunjukkan hambatan yang membatasi kontribusi UMKM terhadap pemutusan rantai kemiskinan dan pengangguran. Akses pelatihan belum merata, perlindungan kerja formal belum tersedia, keterlibatan dalam forum representatif dan sumber daya eksternal masih minim, serta keterampilan digital pekerja miskin relatif rendah.

Masalah tersebut terlihat dalam praktik kerja sehari-hari. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum berjalan secara sistematis. Sebagian UMKM belum memiliki prosedur kerja aman, alat pelindung diri yang memadai, dan pembekalan keselamatan kerja. Akibatnya, perlindungan pekerja lebih bergantung pada relasi personal daripada sistem kelembagaan. Temuan ini perlu dibaca dalam konteks bahwa usaha kecil sering menghadapi keterbatasan sistem K3 dan perlindungan kerja (International Labour Organization, 2017; Suardi, 2016). Pelatihan juga banyak berlangsung secara informal melalui *learning by doing*. Sebagian UMKM tidak menyediakan pelatihan karena mempertimbangkan efisiensi produksi. Pada aspek representasi, UMKM cenderung pasif dalam menjembatani akses bantuan sosial dan pelatihan eksternal. Informasi lebih banyak dikelola oleh RT, RW, dan kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi advokasi dan jejaring belum optimal. Pemanfaatan teknologi pada sebagian UMKM juga masih terpusat pada pemilik atau tenaga administrasi. Pekerja dari kelompok miskin belum banyak memperoleh pelatihan digital, padahal keterampilan tersebut semakin menentukan akses pasar dan peluang kerja baru (Munthe & Narawi, 2024; Tambunan, 2019). Karena itu, keberadaan pekerjaan saja belum cukup. Pemberdayaan memerlukan proses yang aman, terarah, serta mampu memperluas kapasitas dan akses kelompok miskin.

Penelitian ini menggunakan kerangka Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016) yang membagi peran aktor pemberdayaan ke dalam empat aspek, yaitu fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan empiris di tingkat kelurahan mengenai kesenjangan pelaksanaan keempat peran tersebut. Analisis memberi perhatian khusus pada K3, pelatihan terstruktur, representasi akses layanan dan pelatihan, serta literasi digital pekerja miskin. Aspek tersebut sering terabaikan ketika UMKM hanya dipandang sebagai penyerap tenaga kerja (Nursini, 2020; Soetarto & Tambunan, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis peran UMKM dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Cigugur Tengah. Penelitian juga mengidentifikasi titik lemah yang perlu diperkuat agar pemberdayaan lebih aman, terarah, inklusif, dan adaptif terhadap tuntutan digital.

LITERATUR

UMKM sebagai Aktor Ekonomi Lokal

UMKM dipahami sebagai usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan. Klasifikasi dan arah pengembangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, termasuk tujuan memperkuat kemandirian usaha, memperluas kesempatan kerja, dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2008). Dalam konteks lokal, UMKM menjadi bagian dari struktur penghidupan warga karena memobilisasi sumber daya setempat, menyerap tenaga kerja di sekitar wilayah operasional, serta membangun relasi produksi dan distribusi yang dekat dengan komunitas (Abdurohim, 2021; Kartika, 2021; Tambunan, 2019). Karena itu, UMKM sering diposisikan sebagai penggerak ekonomi yang dapat memperluas kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga sehingga berdampak pada kesejahteraan dan penurunan pengangguran (Prasetyo, 2008; Ariani & Suresmiathi, 2013). Dalam penelitian ini, UMKM dipahami sebagai aktor ekonomi lokal bukan semata karena skala usahanya, tetapi karena kemampuannya menciptakan ruang partisipasi ekonomi yang relatif lebih mudah diakses oleh warga miskin dibandingkan sektor formal. UMKM dapat menjadi pintu masuk bagi kelompok miskin untuk memperoleh pengalaman kerja, keterampilan, dan jejaring ekonomi yang berpotensi menguatkan daya tawar serta stabilitas penghidupan rumah tangga (Nursini, 2020; Qadisyah et al., 2023; Soetarto & Tambunan, 2024).

Peran sebagai Bentuk Tindakan Sosial

Konsep peran digunakan untuk menilai kontribusi UMKM sebagai tindakan dalam struktur sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari status sosial, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang tampak dalam perilaku atau tindakan (Soekanto, 2002, 2003, 2009). Dalam pengembangan masyarakat, peran menekankan upaya mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisasi kebutuhan dan menentukan perbaikan kehidupannya secara lebih mandiri (Ife & Tesoriero, 2016). Dengan demikian, variabel peran UMKM dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dapat diidentifikasi dari praktik usaha sehari-hari dan hubungan UMKM dengan warga atau komunitas. Mengacu pada Ife dan Tesoriero (2016), peran UMKM dioperasionalkan melalui empat fungsi yang paling relevan dengan pemberdayaan.

1. Fungsi fasilitatif, yaitu tindakan UMKM yang memudahkan akses warga miskin terhadap peluang kerja atau usaha dan sumber daya, seperti perekrutan tenaga kerja lokal, pelibatan dalam proses produksi, dukungan sarana sederhana, atau pengorganisasian kerja berbasis komunitas.
2. Fungsi edukatif, yaitu tindakan pembelajaran melalui pelatihan atau pendampingan keterampilan, seperti kewirausahaan, pengelolaan usaha dan keuangan, kualitas produksi, serta pemasaran agar warga miskin meningkatkan kapasitasnya untuk bekerja atau berusaha secara mandiri.
3. Fungsi jejaring atau representasional, yaitu tindakan UMKM membangun kemitraan dan menjembatani warga atau komunitas dengan sistem sumber yang lebih luas, seperti pasar, pemasok, lembaga pendanaan, dan program pemerintah agar kelompok miskin memperoleh akses yang lebih setara terhadap peluang dan dukungan eksternal.
4. Fungsi teknis, yaitu dukungan terhadap praktik kerja dan tata kelola yang menunjang keberlanjutan aktivitas ekonomi, seperti pencatatan sederhana, standardisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi dasar, dan pengelolaan informasi usaha untuk meningkatkan kinerja serta efisiensi.

Keempat fungsi tersebut menjaga fokus analisis karena menjadi jembatan konsep dari UMKM menuju pemberdayaan. Fasilitasi memperluas akses awal, edukasi meningkatkan kapasitas, jejaring memperbesar peluang dan dukungan, sedangkan fungsi teknis memperkuat keberlanjutan praktik ekonomi (Ife & Tesoriero, 2016).

Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Proses dan Capaian

Pemberdayaan dipahami sebagai proses penyediaan sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan ruang partisipasi agar kelompok rentan memiliki kendali lebih besar atas pilihan hidupnya (Chabib, 2014; Ife & Tesoriero, 2016). Suharto (2005) menekankan pemberdayaan sebagai rangkaian tindakan untuk memperkuat posisi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri. Karena itu, pemberdayaan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses berupa perluasan akses dan peningkatan kapasitas sekaligus capaian berupa menguatnya kemandirian dan membaiknya kondisi sosial-ekonomi. Dimensi pemberdayaan sosial menekankan penguatan kapasitas dan keberfungsian sosial kelompok rentan agar mampu menghadapi masalah sosial, mengurangi ketergantungan, serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan komunitas (Republik Indonesia, 2019). Pemberdayaan sosial juga berkaitan dengan kesetaraan akses terhadap informasi, pengetahuan, keterampilan, partisipasi sosial, dan sumber keuangan yang memungkinkan kelompok rentan memperbaiki posisi sosialnya (Friedmann, 1992, sebagaimana dikutip dalam Hutomo, 2000). Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan sosial tercermin pada meningkatnya kemampuan warga mengakses informasi dan peluang, menguatnya jejaring dukungan, serta meningkatnya partisipasi dalam aktivitas produktif dan sosial di tingkat lokal. Dimensi pemberdayaan ekonomi menekankan peningkatan taraf hidup melalui penguatan akses terhadap sumber daya ekonomi, pengembangan keterampilan produktif, serta peningkatan kapasitas agar masyarakat lebih mandiri dalam aktivitas ekonomi (Abdurohim, 2021; Triatmanto et al., 2020). Secara operasional, pemberdayaan ekonomi terlihat dari peningkatan keterampilan kerja atau usaha, produktivitas, stabilitas penghasilan, dan perluasan akses pasar atau peluang kerja. Dengan demikian, pemberdayaan sosial dan ekonomi merupakan dua dimensi yang saling terkait karena peningkatan keterampilan serta pendapatan bergantung pada akses jejaring, dukungan sosial, dan peluang di tingkat komunitas (Hutomo, 2000; Lestari, 2020; Suharto, 2005).

Kemiskinan sebagai Kondisi Sasaran

Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur melalui pendekatan pengeluaran dan garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap informasi, keterampilan, modal, jaringan, pilihan, dan kesempatan untuk hidup layak (Hutomo, 2000; Suharto, 2005). Pada tingkat lokal, identifikasi kelompok sasaran dapat merujuk pada kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang mencakup mata pencaharian, akses layanan dasar, dan kondisi perumahan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013). Dalam penelitian ini, kemiskinan diposisikan sebagai kondisi awal yang menjelaskan kerentanan sekaligus menjadi konteks untuk menilai sejauh mana peran UMKM mampu memperluas akses dan memperkuat kemandirian sosial-ekonomi.

METODE

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang lengkap, rinci, dan mendalam mengenai peran UMKM dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap makna dan menafsirkan fenomena berdasarkan pandangan partisipan dalam aktivitas sosialnya, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Moleong, 2017; Sugiyono, 2022).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada UMKM di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah padat penduduk dengan dinamika ekonomi yang kuat, (terutama sektor usaha mikro dan kecil). Penelitian memanfaatkan latar terbuka (ruang fisik seperti kantor/rumah/tempat umum) dan latar tertutup (relasi/interaksi pelaku usaha dengan masyarakat miskin yang terlibat).

Sumber Data dan Teknik Penentuan Informan

1. Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi dari pelaku UMKM serta masyarakat miskin/pekerja yang terlibat dalam proses pemberdayaan.
2. Data sekunder, berasal dari studi dokumentasi dan data yang tersedia pada aparaturnya Kelurahan (misalnya data demografis dan data UMKM), serta penelusuran informasi pendukung.

Penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Kriteria informan mencakup UMKM yang berhasil mengembangkan usaha dan berkontribusi pada pemberdayaan, serta pekerja atau masyarakat miskin yang terlibat minimal empat tahun, menerima bantuan sosial, merasakan dampak positif, bersedia diwawancarai, dan tidak memiliki kedekatan personal dengan peneliti.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)
Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan atau instrumen wawancara yang merujuk pada aspek teori peran, yaitu fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Dalam proses wawancara, peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan konsep penelitian, meminta izin serta kesediaan informan, meminta izin perekaman suara, dan melakukan konfirmasi ulang terhadap jawaban informan. Prosedur tersebut sesuai dengan prinsip wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif.
2. Observasi
Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap informan dan lingkungan yang berkaitan dengan peran UMKM dalam pemberdayaan. Perlengkapan observasi mencakup catatan lapangan, alat tulis, dokumentasi visual, formulir pemeriksaan observasi, dan alat rekam suara apabila diperlukan serta telah mendapat izin.
3. Studi dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperjelas konteks penelitian, seperti profil kelurahan, data demografis, dan data UMKM aktif, serta untuk mendukung dan memeriksa hasil wawancara maupun observasi.

Pemeriksaan Keabsahan Data (Trustworthiness)

1. Kredibilitas dengan triangulasi (membandingkan data dari berbagai metode/sumber).
Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari berbagai pihak (termasuk pihak yang memahami perkembangan UMKM di kelurahan). Triangulasi teknik: memeriksa data dari sumber yang sama dengan metode berbeda (wawancara, observasi, dokumentasi); bila berbeda dilakukan diskusi lanjutan untuk memperoleh kejelasan. Triangulasi waktu: wawancara dilakukan saat informan senggang/tidak sibuk agar data lebih akurat dan mendalam.
2. Transferability: pelaporan disusun rinci, jelas, sistematis, agar dapat dipahami dan digunakan pada konteks serupa.
3. Dependability: audit seluruh tahapan penelitian oleh pihak independen/pembimbing (mulai pemilihan sumber data hingga kesimpulan).

4. Confirmability: pendampingan pembimbing untuk memastikan tahapan penelitian tepat dan sesuai prosedur, mengurangi subjektivitas.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles et al. (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus dan saling berkaitan sepanjang penelitian hingga tidak ditemukan informasi atau temuan baru yang signifikan.

Etika Penelitian

Etika penelitian diterapkan melalui prosedur meminta izin dan kesediaan informan sebelum wawancara, termasuk izin untuk melakukan perekaman suara bila diperlukan. Selain itu, penggunaan alat rekam dalam observasi juga dilakukan hanya jika dibutuhkan dan mendapat izin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran UMKM dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Cigugur Tengah. Analisis menggunakan kerangka Ife dan Tesoriero (2016) yang mencakup peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Kerangka tersebut menempatkan UMKM bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang membentuk kapasitas, akses, dan posisi tawar masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menjalankan seluruh peran pemberdayaan, tetapi intensitas, kualitas, dan konsistensinya tidak seimbang. Peran fasilitatif dan edukatif paling mudah diamati dalam penyediaan kesempatan kerja, bantuan ekonomi langsung, dan pelatihan berbasis praktik. Sebaliknya, peran representasional dan teknis masih terbatas, sporadis, dan belum terlembagakan. Pelaksanaan peran juga sangat bergantung pada inisiatif individual pemilik UMKM. Kondisi ini menghasilkan variasi yang tinggi antar-UMKM dalam bentuk dukungan, kualitas pelatihan, dan keterlibatan jejaring eksternal. Ketimpangan tersebut membentuk pola pemberdayaan yang berorientasi pada kelangsungan hidup atau survival-oriented empowerment. Pola ini membantu masyarakat miskin mempertahankan penghidupan dan mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek. Namun, pola tersebut belum konsisten mendorong mobilitas kerja, akses sumber daya eksternal, dan kapasitas adaptif jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pemberdayaan ditentukan oleh konfigurasi dan integrasi peran, bukan sekadar keberadaan UMKM (Ife & Tesoriero, 2016; Nursini, 2020)

Peran UMKM sebagai Fasilitator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitatif merupakan peran yang paling kuat, paling dominan, dan paling konsisten dijalankan oleh UMKM. UMKM berfungsi sebagai mekanisme inklusi ekonomi awal bagi masyarakat miskin melalui penyediaan kesempatan kerja yang relatif mudah diakses. Proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara informal dan berbasis relasi sosial, seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, dan kedekatan geografis dengan lokasi usaha. Bentuk fasilitasi yang diberikan UMKM mencakup dukungan ekonomi dan sosial yang bersifat langsung, antara lain:

1. Sistem pengupahan fleksibel (harian, mingguan, atau borongan);
2. Pemberian upah lembur dan toleransi keterlambatan pembayaran pada kondisi tertentu;
3. Bantuan nonmoneter seperti sembako dan konsumsi kerja;
4. Pinjaman dana darurat tanpa prosedur administratif formal; serta
5. Fleksibilitas jam kerja yang memungkinkan pekerja menjalankan peran domestik dan sosial secara bersamaan.

Selain itu, UMKM memfasilitasi penggunaan alat produksi dan membagi tugas kerja berdasarkan kemampuan individu. Pembagian kerja dilakukan secara bertahap dan sederhana, sehingga individu dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan tetap dapat berpartisipasi dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian kerja terhadap kondisi sosial ekonomi pekerja. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fasilitasi tersebut tidak disertai dengan mekanisme perlindungan kerja yang terstandar. Tidak ditemukan standar operasional baku terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan kerja, maupun prosedur mitigasi risiko. Bantuan kesehatan diberikan secara insidental dan reaktif, bergantung pada kebijakan personal pemilik usaha.

Dominasi peran fasilitatif menegaskan fungsi UMKM sebagai penyangga ekonomi rumah tangga miskin. Ketika akses terhadap pekerjaan formal terbatas, UMKM menyediakan ruang ekonomi alternatif yang relatif inklusif (Nursini, 2020; Soetarto & Tambunan, 2024). Fleksibilitas rekrutmen, jam kerja, dan sistem upah memungkinkan masyarakat miskin memperoleh pendapatan meskipun memiliki keterampilan terbatas. Namun, temuan ini juga menunjukkan paradoks fasilitasi. Fleksibilitas membuka akses, tetapi ketiadaan formalitas dapat menciptakan kerentanan baru. Hubungan kerja yang sepenuhnya berbasis relasi personal melemahkan posisi tawar pekerja serta meningkatkan ketidakpastian pendapatan dan perlindungan kerja. Dalam teori pemberdayaan, fasilitasi seharusnya menjadi tahap awal menuju penguatan kapasitas dan kemandirian (Ife & Tesoriero, 2016; Suharto, 2005). Pada lokasi penelitian, fasilitasi masih cenderung charity-oriented karena lebih banyak membantu pekerja bertahan. Praktik tersebut belum sepenuhnya rights-and capacity-oriented karena belum mengurangi kerentanan struktural. Karena itu, peran fasilitatif yang kuat belum otomatis menghasilkan pemberdayaan berkelanjutan. Fasilitasi tanpa proteksi dapat mempertahankan ketergantungan dan menormalisasi kondisi kerja yang rentan (International Labour Organization, 2017; Suardi, 2016; Suharto, 2007)

Peran UMKM sebagai Edukator

Pada aspek edukatif, UMKM berfungsi sebagai ruang pembelajaran kerja informal bagi masyarakat miskin. Pelatihan dilakukan melalui pendekatan learning by doing, di mana pekerja baru belajar secara langsung di tempat kerja dengan pendampingan pemilik usaha atau pekerja yang lebih berpengalaman. Materi pembelajaran mencakup

keterampilan teknis produksi, pengelolaan waktu kerja, serta internalisasi nilai-nilai kerja seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama. Proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual, mengikuti ritme produksi dan kemampuan individu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tidak dirancang secara sistematis. Tidak ditemukan kurikulum tertulis, modul pembelajaran, indikator keberhasilan, atau mekanisme evaluasi. Durasi dan kualitas pelatihan sangat bervariasi antar-UMKM dan antar-pekerja. Sebagian pekerja memperoleh pendampingan intensif, sementara yang lain belajar secara mandiri melalui pengalaman kerja. Pelatihan soft skills dan pengembangan kapasitas personal seperti komunikasi, perencanaan keuangan, dan pemecahan masalah ditemukan sangat terbatas dan tidak menjadi agenda eksplisit UMKM.

Pembelajaran berbasis praktik memiliki keunggulan bagi masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal. Pendekatan *learning by doing* memungkinkan transfer keterampilan yang cepat dan relevan dengan kebutuhan kerja serta dapat meningkatkan produktivitas (Ariani & Suresmiathi, 2013; Fatimah, 2019). Namun, ketiadaan struktur membuat pembelajaran bersifat fragmentaris dan berjangka pendek. Tanpa kurikulum dan evaluasi, pengalaman kerja tidak selalu terakumulasi menjadi modal manusia yang mendukung mobilitas sosial-ekonomi. Pekerja mungkin terampil menjalankan satu tugas, tetapi belum memperoleh kompetensi yang meningkatkan daya tawar di pasar kerja yang lebih luas. Dalam literatur pemberdayaan, pendidikan merupakan proses yang membantu individu meningkatkan kendali atas kehidupannya (Ife & Tesoriero, 2016; Suharto, 2005). Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran edukatif UMKM masih dominan instrumental karena terutama melayani kebutuhan produksi. Peran tersebut belum sepenuhnya transformasional dan belum mengembangkan kapasitas pekerja secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pelatihan, tetapi juga oleh desain, evaluasi, dan orientasi jangka panjangnya.

Peran UMKM sebagai Representasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran representasional merupakan peran yang paling lemah dijalankan oleh UMKM. UMKM memang terlibat dalam kegiatan sosial di tingkat lokal, seperti partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberian bantuan sosial. Namun, keterlibatan tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak berfungsi sebagai mekanisme advokasi atau perluasan akses. Sebagian besar UMKM belum berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat miskin dan sumber daya eksternal, seperti program pelatihan pemerintah, bantuan sosial produktif, pembiayaan, atau jejaring pasar yang lebih luas. Informasi mengenai peluang-peluang tersebut jarang disalurkan secara aktif kepada pekerja atau masyarakat sekitar. Pemanfaatan media sosial UMKM masih berorientasi pada promosi bisnis dan tidak digunakan secara strategis sebagai sarana diseminasi informasi sosial atau representasi kepentingan pekerja.

Lemahnya peran representasional memiliki implikasi struktural. Dalam pengembangan masyarakat, representasi menghubungkan komunitas dengan peluang dan sumber daya eksternal (Ife & Tesoriero, 2016). Tanpa fungsi ini, masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran lokal yang terbatas dan sulit mengakses pelatihan, pembiayaan, pasar, serta program pemerintah yang dapat meningkatkan kapasitas. Temuan menunjukkan bahwa UMKM belum diposisikan dan belum memposisikan diri sebagai aktor advokasi dalam ekosistem pemberdayaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas organisasi yang terbatas, fokus pada keberlangsungan usaha harian, dan belum tersedianya platform kolaborasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fungsi representasional, pendampingan, media, dan jejaring dapat memperluas akses informasi serta sumber daya bagi UMKM dan komunitas (Ningsih et al., 2024; Rachmah, 2022). Namun, pada lokasi penelitian, fungsi penghubung tersebut belum berkembang secara memadai. Akibatnya, pemberdayaan cenderung stagnan pada tingkat lokal

Peran UMKM sebagai Teknis

Pada aspek teknis, UMKM telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung operasional usaha, terutama dalam pemasaran dan komunikasi pelanggan. Namun, pemanfaatan teknologi masih terpusat pada pemilik usaha atau admin. Pekerja dari kelompok miskin jarang dilibatkan dalam pengelolaan teknis, pendataan, atau penggunaan teknologi digital. Tidak ditemukan program pelatihan literasi digital atau mekanisme transfer keterampilan teknis kepada pekerja. Akibatnya, keterampilan digital pekerja tidak berkembang secara signifikan.

Keterbatasan peran teknis menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam pemberdayaan berbasis UMKM. Literasi teknis dan digital menjadi prasyarat penting bagi mobilitas kerja dalam ekonomi yang semakin terdigitalisasi (Munthe & Narawi, 2024; Tambunan, 2019). Tanpa keterampilan tersebut, pekerja miskin berisiko tetap berada pada pekerjaan berupah rendah dan sulit beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Peran teknis juga mencakup pendataan pekerja, dokumentasi keterampilan, dan evaluasi kinerja. Ketiadaan sistem tersebut membuat perkembangan kapasitas sulit diukur, ditingkatkan, dan direplikasi. Karena itu, digitalisasi UMKM perlu diarahkan tidak hanya untuk efisiensi bisnis, tetapi juga untuk peningkatan kompetensi pekerja.

Tabel 1. Matriks Ringkasan Peran UMKM dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin

Peran	Indikator kunci	Temuan dan intensitas	Kesenjangan serta arah penguatan
Fasilitatif	Akses kerja lokal, fleksibilitas jam dan upah, bantuan sosial-ekonomi, penggunaan alat produksi.	Sangat kuat. UMKM membuka akses kerja bagi masyarakat miskin dan menopang stabilitas pendapatan jangka pendek.	Belum disertai K3, jaminan kerja, dan prosedur perlindungan minimum. Perlu SOP sederhana, alat pelindung diri, dan mekanisme perlindungan dasar.

Edukatif	Learning by doing, keterampilan produksi, disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama.	Kuat, tetapi belum sistematis. Pelatihan relevan dengan kebutuhan produksi dan meningkatkan keterampilan dasar.	Belum ada kurikulum, indikator keberhasilan, evaluasi, soft skills, dan literasi keuangan. Perlu modul singkat dan pencatatan perkembangan kompetensi.
Representasional	Akses pelatihan eksternal, bantuan produktif, pembiayaan, jejaring pasar, informasi, dan advokasi.	Lemah. UMKM belum aktif menghubungkan pekerja miskin dengan sumber daya dan peluang eksternal.	Perlu forum kolaborasi UMKM, kelurahan, komunitas, lembaga pendanaan, serta saluran informasi dan rujukan program.
Teknis	Literasi digital, pendataan pekerja, dokumentasi keterampilan, evaluasi kinerja, dan pemanfaatan teknologi.	Terbatas. Teknologi lebih banyak dikuasai pemilik atau admin dan belum ditransfer kepada pekerja.	Perlu pelatihan digital dasar, sistem pendataan kompetensi, evaluasi berkala, dan pelibatan pekerja dalam proses teknis.

Sumber: Hasil olahan penelitian berdasarkan kerangka Ife dan Tesoriero (2016).

Sintesis Temuan: Ketimpangan Antarperan dan Dampaknya

Sintesis temuan menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial ekonomi oleh UMKM merupakan hasil konfigurasi dan hubungan antarperan. Pemberdayaan tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang direkrut atau jumlah pelatihan yang dilaksanakan. Analisis perlu menilai apakah akses kerja diikuti pembelajaran, perluasan jejaring, advokasi, serta penguatan sistem dan literasi teknis. Temuan memperlihatkan ketimpangan struktural. Peran fasilitatif dan edukatif berkembang relatif kuat, sedangkan peran representasional dan teknis tertinggal. Ketimpangan ini menunjukkan adanya mata rantai pemberdayaan yang terputus. Peran fasilitatif dan edukatif berfungsi sebagai entry functions yang membuka akses dan membangun kemampuan dasar. Peran representasional dan teknis berfungsi sebagai scaling and sustaining functions yang memperluas peluang serta menjaga keberlanjutan. Ketika dua fungsi terakhir lemah, pemberdayaan berhenti pada tahap adaptasi dan belum mencapai transformasi (Ife & Tesoriero, 2016).

Peran fasilitatif membuka akses ekonomi melalui kesempatan kerja dan dukungan sosial langsung. Peran ini mengurangi hambatan masuk bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan pendidikan, modal sosial formal, dan akses pasar kerja. Fleksibilitas kerja serta bantuan sosial-ekonomi menciptakan stabilitas minimum bagi rumah tangga miskin. Peran edukatif melengkapi akses tersebut melalui transfer keterampilan dasar berbasis praktik. Kombinasi kedua peran meningkatkan kapasitas kerja dasar, memperluas peluang memperoleh pendapatan, dan membantu rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi jangka pendek (Nursini, 2020; Qadisya et al., 2023; Soetarto & Tambunan, 2024). Namun, dampaknya masih terkonsentrasi pada stabilisasi. Stabilitas meningkatkan daya tahan rumah tangga, tetapi tidak selalu mengubah posisi struktural mereka. Stabilisasi membantu individu bertahan dalam sistem yang sama, sedangkan transformasi menuntut peningkatan kapasitas dan akses yang memungkinkan mobilitas sosial-ekonomi.

Ketimpangan peran menjadi penting ketika akses awal tidak diikuti perluasan peluang. Lemahnya peran representasional membatasi kemampuan UMKM untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan pelatihan formal, bantuan produktif, jaringan pasar, dan advokasi kebijakan. Ketiadaan jembatan ini menciptakan local opportunity lock-in, yaitu kondisi ketika peluang peningkatan kapasitas dan ekonomi terkunci dalam ekosistem lokal yang terbatas. Masyarakat miskin kehilangan sumber daya tambahan dan kanal untuk memperkuat posisi tawar terhadap pasar, pemerintah, dan lembaga pendukung. Keterbatasan peran teknis juga menghambat akumulasi modal manusia. Pendataan keterampilan, dokumentasi proses kerja, pelacakan kompetensi, evaluasi, dan umpan balik belum tersedia secara sistematis. Akibatnya, pembelajaran tetap insidental dan sulit diubah menjadi jalur mobilitas kerja yang jelas. Kondisi ini menguatkan pentingnya peran jejaring, representasi, dan pendampingan kelembagaan dalam memperluas struktur kesempatan (Ningsih et al., 2024; Rachmah, 2022).

Lemahnya peran teknis juga memunculkan kesenjangan digital internal. Teknologi masih dikuasai pemilik atau admin, sedangkan pekerja miskin jarang dilibatkan. Digitalisasi kemudian meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi tidak selalu meningkatkan kapasitas pekerja. Kondisi ini memisahkan business upgrading dari worker upgrading. Usaha dapat berkembang, sementara kompetensi pekerja miskin tidak meningkat secara proporsional. Konfigurasi tersebut menghasilkan pola pemberdayaan survival-oriented. UMKM efektif menjaga keberlangsungan hidup ekonomi jangka pendek, tetapi belum kuat mendorong mobilitas sosial-ekonomi jangka panjang. UMKM berfungsi sebagai penyangga ekonomi komunitas, tetapi belum sepenuhnya menjadi pengungkit transformasi. Temuan ini konsisten dengan kajian yang menempatkan keterampilan digital dan peningkatan kapasitas sebagai faktor penting bagi keberlanjutan serta adaptasi UMKM (Munthe & Narawi, 2024; Tambunan, 2019). Pola tersebut tampak pada tiga gejala berikut:

1. Ketergantungan pada akses lokal (pendapatan dan peluang berputar pada sumber yang sama),
 2. Ketidakpastian mobilitas (tidak ada jalur peningkatan peran/kompetensi yang jelas), dan
 3. Minimnya perluasan kesempatan (akses pelatihan, pasar, dan advokasi tidak terinstitusionalisasi).
- Secara konseptual, pemberdayaan merupakan hasil integrasi peran dalam suatu rantai nilai pemberdayaan. Peran fasilitatif menyediakan akses. Peran edukatif membangun kapasitas dasar. Peran representasional memperluas struktur kesempatan. Peran teknis menjaga keberlanjutan kapasitas melalui sistem (Ife & Tesoriero, 2016). Jika rantai tersebut terputus pada peran representasional dan teknis, pemberdayaan berhenti pada tahap adaptasi. Karena itu, pertanyaan kuncinya bukan apakah UMKM menjalankan peran pemberdayaan, tetapi sejauh mana peran tersebut terhubung dalam jalur yang utuh. Jalur tersebut dimulai dari akses kerja, peningkatan kompetensi, perluasan peluang eksternal, dan penguatan sistem kapasitas. Sistem kapasitas mencakup pendataan keterampilan, literasi teknis dan digital, serta

mekanisme pengembangan berkelanjutan. Tanpa perluasan peluang dan sistem kapasitas, pemberdayaan cenderung berhenti pada stabilisasi ekonomi dan belum menghasilkan mobilitas sosial-ekonomi jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis peran UMKM dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Cigugur Tengah dengan menggunakan kerangka lfe dan Tesoriero (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Namun, pelaksanaannya belum seimbang dan belum terintegrasi. Peran fasilitatif dan edukatif paling menonjol melalui pembukaan akses kerja, dukungan sosial-ekonomi langsung, dan pelatihan berbasis praktik. Peran representasional dan teknis masih lemah, terutama dalam menghubungkan pekerja miskin dengan pelatihan formal, bantuan produktif, jejaring pasar, advokasi, pendataan keterampilan, dan literasi digital. Kondisi tersebut menghasilkan manfaat yang kuat pada stabilisasi ekonomi jangka pendek, tetapi belum menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan. Jalur pemberdayaan yang utuh perlu dimulai dari akses kerja, dilanjutkan peningkatan kompetensi, diperluas melalui peluang eksternal, dan diperkuat oleh sistem kapasitas. Tanpa dua tahap terakhir, pemberdayaan cenderung tetap survival-oriented dan mobilitas sosial-ekonomi pekerja miskin menjadi terbatas.

Temuan ini sejalan dengan Nursini (2020), yang menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum cukup untuk menghasilkan mobilitas sosial-ekonomi. Dampak yang lebih transformatif memerlukan integrasi antara akses kerja, peningkatan kapasitas, jejaring eksternal, dan sistem teknis. Temuan ini juga memiliki titik temu dengan Ningsih et al. (2024), yang menegaskan pentingnya peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis dalam pengembangan UMKM. Perbedaannya terletak pada aktor dan kualitas pelaksanaan. Ningsih et al. menempatkan pendamping sebagai penggerak empat peran tersebut, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa UMKM belum mampu menjalankan peran representasional dan teknis secara memadai tanpa dukungan kelembagaan. Perbandingan ini menegaskan bahwa efektivitas pemberdayaan bergantung pada keterhubungan antarperan dan dukungan ekosistem, bukan hanya pada keberadaan UMKM.

Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada penggunaan lensa ketimpangan peran untuk menjelaskan mengapa pemberdayaan berbasis UMKM kuat pada akses dan keterampilan dasar, tetapi lemah pada mobilitas dan keberlanjutan. Konfigurasi dan integrasi peran menjadi mekanisme utama yang menjelaskan kualitas pemberdayaan. Implikasi praktisnya menuntut agenda penguatan yang berorientasi pada transformasi. Pertama, peran fasilitatif perlu dilengkapi perlindungan kerja minimum dan K3 dasar agar akses kerja tidak menciptakan kerentanan baru (International Labour Organization, 2017; Suardi, 2016). Kedua, peran edukatif perlu dikembangkan menjadi pelatihan terstruktur yang mencakup keterampilan teknis, soft skills, dan literasi keuangan. Ketiga, peran representasional perlu diperkuat melalui kolaborasi antara UMKM, kelurahan, komunitas, lembaga pendanaan, dan jaringan pasar (Ningsih et al., 2024; Rachmah, 2022). Keempat, peran teknis perlu diarahkan pada literasi digital pekerja dan sistem pendataan keterampilan (Munthe & Narawi, 2024; Tambunan, 2019). Penelitian selanjutnya perlu menguji efektivitas penguatan peran representasional dan teknis melalui desain evaluatif atau longitudinal. Riset juga perlu menggabungkan data kualitatif dengan pengukuran kuantitatif mengenai pendapatan, stabilitas kerja, dan mobilitas peran serta memperluas kajian ke wilayah dan tipe UMKM lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D. (2021). *Pengembangan UMKM*. Refika Aditama.
- Ariani, D., & Suresmiathi, A. A. A. (2013). Pengaruh kualitas tenaga kerja, bantuan modal usaha dan teknologi terhadap produktivitas kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jimbaran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), 102–107.
- Badan Pusat Statistik. (2022, November 30). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/041b11a57ce8fe671631f684/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024, November 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulan. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-4-91-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2026, January 2). *Profil kemiskinan di Kota Cimahi Maret 2025*. <https://cimahikota.bps.go.id/id/pressrelease/2026/01/02/1152/poverty-profile-in-cimahi-municipality-march-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024, November 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat di Agustus 2024 sebesar 6,75 persen. <https://jabar.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/1162/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-jawa-barat-di-agustus-2024-sebesar-6-75-persen.html>

- Chabib, S. (2014). *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Fokusmedia.
- Fatimah, S. (2019). Pembagian tugas kerja berbasis kompetensi di UMKM dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(2), 55–67.
- Hutomo, M. Y. (2000, March 6). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan teoretik dan implementasi [Paper presentation]. *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat*, Bappenas, Jakarta, Indonesia.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- International Labour Organization. (2017). *Improving occupational safety and health in small businesses*.
- Kartika, A. (2021). Peran UMKM berbasis kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 8(2), 134–145.
- Kelurahan Cigugur Tengah. (2024). *Profil Kelurahan Cigugur Tengah tahun 2024* [Dokumen tidak diterbitkan].
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, January 30). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2013). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu*.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis skripsi, tesis, dan disertasi*. Prenadamedia Group.
- Lestari, D. (2020). Peran UMKM dalam membangun solidaritas sosial ekonomi melalui kegiatan kolektif. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 90–102.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munthe, Y. U., & Narawi. (2024). Peran kewirausahaan berbasis digital dalam mengurangi tingkat pengangguran. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(1), 23–29.
- Ningsih, A. W., Adda, H. W., Rossanty, N. P. E., & Lamusa, F. (2024). Dampak peran pendamping terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Kabonena Kota Palu Sulawesi Tengah. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 251–262. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i2.391>
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: Empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Pemerintah Kota Cimahi. (2024). *Data pelaku UMKM Kota Cimahi* [Dokumen pemerintah daerah].
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024, October 26). *Hari Oeang Republik Indonesia: Bey Machmudin, UMKM tulang punggung ekonomi di Jawa Barat*. <https://jabarprov.go.id/berita/hari-oeang-republik-indonesia-bey-machmudin-umkm-tulang-punggungan-ekonomi-di-jawa-barat-16023>
- Prasetyo, P. E. (2008). *Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Qadisyah, Maulida, Hasanah, A., Hanum, H., & Harahap, N. (2023). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Maninvest*, 1(2). <https://doi.org/10.37832/maninvest.v1i2.58>
- Rachmah, N. (2022). Peran UMKM sebagai agen informasi sosial-ekonomi: Studi pada sentra batik Pekalongan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2), 76–90.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*.
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). *Beberapa teori sosiologi tentang struktur*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetarto, T. M. R. P. D., & Tambunan, Y. E. (2024). Peran usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi di Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah). *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 67–76. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4135>
- Suardi, M. (2016). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal K3*, 6(2), 43–55.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Vol. 5). Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerja sosial*. PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat peluang*. PT Refika Aditama.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM dan pembangunan ekonomi: Tantangan dan peluang*. Ghalia Indonesia.
- Triatmanto, B., Sanusi, A., & Siswati, A. (2020). Strategi mempertahankan usaha dan meningkatkan peran masyarakat di masa pandemi Covid-19 pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Batik Zheng. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/10.33366/jast.v4i2.2063>

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>